

ANALISIS VIDEO WAWANCARA ALASAN KEENGGANAN UNTUK MENIKAH DI JEPANG

K. P. H. Siahaan¹, R. Arfianty²

¹²Prodi Sastra Jepang, Universitas Sumatera Utara, Medan
e-mail: siahaankarin12@gmail.com, rani.arfianty@usu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan dan pengalaman individu terkait keengganan untuk menikah di Jepang, terutama dalam kaitannya dengan perekonomian, peran gender, dan perubahan preferensi gaya hidup. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data dari tanggapan masyarakat dalam video wawancara yang tersedia di internet. Teknik pengumpulan data adalah simak dan catat, diikuti analisis pola alasan-alasan yang muncul. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, meskipun pemerintah Jepang telah meluncurkan berbagai inisiatif, seperti subsidi, dukungan dana dan pendanaan agen perijodohan, faktor-faktor seperti kekhawatiran finansial, ketidaksetaraan gender, dan perubahan preferensi gaya hidup tetap menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk memotivasi lebih banyak orang untuk menikah di Jepang.

Kata kunci: Video wawancara, keengganan menikah, penurunan penduduk, peran gender

Abstract

This research aims to describe the views and experiences of individuals regarding the reluctance to marry in Japan, particularly in relation to the economy, gender roles, and changing lifestyle preferences. The research is descriptive with a qualitative approach, utilizing data from public responses in video interviews available on the internet. The data collection technique involves listening and noting, followed by an analysis of the patterns of emerging reasons. The results of this study indicate that, although the Japanese government has launched various initiatives, such as subsidies, funding support, and matchmaking agency funding, factors such as financial concerns, gender inequality, and changing lifestyle preferences remain challenges that need to be addressed to motivate more people to marry in Japan.

Keywords: Street interview, marriage reluctance, population decline, gender roles

1. Pendahuluan

Penurunan penduduk telah menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi Jepang selama beberapa dekade terakhir. Jepang mengalami perubahan demografis signifikan yang memengaruhi berbagai aspek sosial, ekonomi, dan politik. Sejalan dengan penelitian oleh Wibawa & Arfianty (2024) [19], faktor demografi dan kebijakan pemerintah memiliki pengaruh besar terhadap fenomena depopulasi dalam dua dekade terakhir. Fenomena ini adalah masalah kompleks yang memiliki beragam akar penyebab dan dampaknya terus meluas ke berbagai sektor kehidupan. Implikasi dari depopulasi ini sangat mendalam, khususnya dalam menentukan arah masa depan Jepang. (Inoue, T., Koike, S., Yamauchi, M., & Ishikawa, Y., 2022) [24]

Jepang, sebuah negara yang terkenal dengan inovasinya dan ekonomi yang kuat, menurut Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida (2023) [18] saat ini menghadapi tantangan serius akibat penurunan penduduknya. Seiring dengan peningkatan harapan hidup dan penurunan angka kelahiran, populasi Jepang terus menurun, mengakibatkan perubahan besar dalam struktur usia penduduk. Ini berdampak pada sektor-sektor seperti tenaga kerja, sistem kesehatan, pendidikan, dan kebijakan sosial. Pada saat yang sama, pertanyaan tentang bagaimana Jepang dapat mempertahankan daya saing ekonominya dalam konteks penurunan penduduk menjadi semakin mendesak.

Penurunan populasi Jepang digambarkan sebagai hal yang sangat mengkhawatirkan. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida (2023) [18] mengatakan bahwa negaranya berada di ambang tidak mampu menjalankan fungsi sosial karena menurunnya angka kelahiran. Pemerintah Jepang telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mengatasi penurunan

populasi selama beberapa dekade terakhir, termasuk kebijakan baru untuk meningkatkan layanan penitipan anak dan meningkatkan fasilitas perumahan bagi keluarga dengan anak.

Ada banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai penurunan penduduk di Jepang oleh berbagai peneliti dari berbagai disiplin ilmu. Dalam faktor tingkat kesuburan menurut Ryo Oizumi (2022) [21], sensitivitas laju pertumbuhan penduduk terhadap laju migrasi dari daerah perkotaan dengan jumlah penduduk besar ke prefektur dengan tingkat kesuburan yang tinggi paling besar terjadi pada penduduk berusia di bawah 30 tahun. Sedangkan, dibandingkan dengan wilayah lain, tingkat kesuburan wilayah perkotaan menunjukkan sensitivitas yang lebih tinggi bagi penduduk berusia di atas 30 tahun. Karena fitur ini lebih kuat dibandingkan dengan tahun 2010 dan 2015, maka dapat dikatakan bahwa struktur ini merupakan struktur yang unik di Jepang belakangan ini. Menurut Sachiko Ijima (2018) [22], faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan angka kelahiran di Jepang antara lain menurunnya angka pernikahan, peningkatan rata-rata usia menikah, beban ekonomi, beban pengasuhan anak, terlambat melahirkan anak, dan infertilitas. Terdapat perbedaan gender dalam pembagian peran, dimana 70% orang yang belum menikah tinggal bersama orang tuanya dan tetap bekerja sambil menyerahkan pekerjaan rumah tangga kepada ibunya. Hilangnya layanan rumah tangga dan peningkatan jumlah pekerja tidak tetap merupakan faktor yang berkontribusi terhadap menurunnya angka pernikahan dan peningkatan usia rata-rata mereka yang menikah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Cyrus Ghaznavi, Haruka Sakamoto, Lisa Yamasaki, Shuhei Nomura, Daisuke Yoneoka, Kenji Shibuya dan Peter Ueda (2022) [6], Laki-laki dengan pendapatan lebih tinggi mempunyai kemungkinan lebih besar untuk mempunyai anak pada semua kelompok kelahiran. Meskipun proporsi anak yang mempunyai anak mengalami penurunan pada semua kelompok pendapatan, penurunan tersebut lebih besar terjadi pada kelompok pendapatan terendah. Di antara perempuan yang lahir pada tahun 1956–1970, mereka yang memiliki gelar sarjana lebih kecil kemungkinannya untuk memiliki anak dibandingkan mereka yang tidak memiliki gelar sarjana.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kecenderungan masyarakat Jepang yang semakin enggan menikah. Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Inoue et al. (2022) [24], menunjukkan bahwa biaya tinggi untuk membesarkan anak menjadi salah satu alasan utama generasi muda Jepang menunda pernikahan. Selain itu, penelitian oleh Eldwita Nofrelia dan Shobichatul Aminah (2022) [8] membahas kebijakan *womenomics* yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Abe Shinzo, yang bertujuan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pekerjaan tetap dan kepemimpinan di Jepang. Namun, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kebijakan ini belum memberikan dampak signifikan terhadap perubahan status pekerjaan perempuan hingga tahun 2020, yang terus didominasi oleh posisi tidak tetap. Penelitian ini berbeda karena menekankan pada analisis kecenderungan sosial dan preferensi individu yang terus berubah dalam konteks budaya Jepang yang dinamis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi para pembuat kebijakan dan akademisi dalam merancang strategi untuk mengatasi penurunan angka pernikahan di Jepang.

2. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan Bodan dan Taylor (dalam Moleong, 2012: 3) [15] pendekatan kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis maupun lisan yang diperoleh dari individu atau sumber yang diobservasi. Oleh karena itu, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa cuplikan kalimat dan dialog dalam video wawancara yang mengungkapkan pandangan individu tentang alasan keengganan untuk menikah di Jepang, dengan sumber data yang berasal dari video wawancara di platform daring seperti YouTube. Contoh data dalam penelitian ini adalah kutipan wawancara yang menggambarkan pandangan masyarakat Jepang terkait biaya hidup yang tinggi sebagai alasan utama keengganan mereka untuk menikah.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data simak dan catat. Teknik simak adalah metode pengumpulan data dengan menyimak bahan yang menjadi sumber data, dalam hal ini adalah video wawancara. Menurut Mahsun (2014) [17], teknik simak dilakukan dengan menyimak secara langsung materi yang mengandung data yang diperlukan. Teknik simak ini dilakukan karena objek yang akan diteliti pada penelitian ini berupa media sosial, yaitu YouTube. Kemudian dilanjutkan dengan teknik catat, yaitu dengan mencatat data dengan alat tulis atau instrumen tertentu (Sudaryanto, 2015:205-206) [23]. Dengan kemajuan teknologi, pencatatan data yang telah diperoleh dilakukan dengan memanfaatkan komputer, yang membantu peneliti mencatat data secara lebih efisien dan terorganisir.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan untuk memahami faktor-faktor sosial dan budaya yang memengaruhi keengganan menikah di Jepang. Data yang terkumpul dianalisis agar membentuk suatu konsep yang sistematis dan bermakna mengenai fenomena sosial yang dikaji.

3. Hasil dan Pembahasan

Penulis akan membahas 3 data berbentuk cuplikan video wawancara yang berhubungan dengan keengganan untuk menikah di Jepang. Data tersebut diambil dari 3 video YouTube yang mewawancarai orang Jepang di jalanan secara acak.

Data 1 (Keengganan menikah karena persoalan keuangan)

Data 1, pada 15 Mei 2023.



Gambar 1. Enggan Menikah karena Persoalan Keuangan

“Kekkon shinakute mo ī ya mitaina... kanji no hito ga motomoto fueta no to ato wa tabun Nihon no sono seifu no kōsō tate seisaku mitaina sō iu no ga tarinakute kodomo wa jibun wa ī ka na toka kekkon ganbō ga usuku natta hito ga ōi no ga gen’in ka natte iu fū ni omoimasu.”

Terjemahan:

“Jumlah orang yang merasa tidak perlu menikah telah meningkat, dan mungkin perencanaan kebijakan pemerintah Jepang kurang, sehingga banyak orang enggan untuk menikah dan punya anak karena memiliki sedikit uang.”

Gambar 1 dan cuplikan wawancara di atas menjelaskan kekurangan dalam hal ekonomi yang menyebabkan keengganan untuk menikah.

Menurut pria dalam video tersebut, kebijakan pemerintah Jepang masih belum cukup untuk mendorong masyarakat Jepang untuk menikah dan mempunyai anak. Kekhawatiran atas kestabilan pekerjaan dan pembiayaan rumah tangga menjadi alasan mengapa banyak masyarakat Jepang menghindari pernikahan. Menurut data dari Kementerian Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang (2020) [5], orang yang tinggal sendiri dengan usia rata-rata 58,5 tahun menghabiskan sekitar 150.000 yen per bulan untuk biaya hidup. Data ini mencerminkan rata-rata nasional, di daerah dengan harga sewa tinggi seperti Tokyo, biaya hidup bulanan cenderung lebih mahal. Puncak pengeluaran umumnya terjadi antara

September dan Desember setiap tahun. Dapat dimengerti mengapa orang Jepang enggan untuk menikah jika melihat biaya hidup 1 orang yang cukup banyak. Namun, disebutkan bahwa pemerintahan Jepang juga sudah memberlakukan beberapa kebijakan yang tampaknya masih belum berdampak, seperti: (1) Memberikan subsidi dana pernikahan bagi pasangan muda di bawah umur 34 tahun [14]; (2) Memberikan dukungan dana untuk keperluan program kehamilan seperti perawatan *Vitro Fertilization (IVF)* (2022) [16]; (3) Mengembangkan Teknologi Artificial Intelligence sebagai Agen Perjodohan [6] dan lain-lain.

Data 2 (Keengganan menikah karena persoalan Peran Gender)

Data 2, pada 7 Juli 2023.



Gambar 2. Enggan menikah karena ketidaksetaraan pembagian tugas rumah tangga

“Dakedomo yappari sōhaittemo hoka no ta no kuni ni kuraberuto mada ano josei ga hataraku shakai ni nattenai. Dō iu koto ka tte iu to josei gadesu ne, -ka o motsu mottara sono kaji no futan toka kodomo-tachi no ne mendōwomiru futanda toka wa hoka no kuni ni kurabetara mō attōteki ni ōi. Sōsurutodesu ne. Kekkon shitakunai ne to iu koto ni tōzen natte.”

Terjemahan:

“Namun, dibandingkan negara lain, Jepang masih belum merupakan masyarakat di mana perempuan bekerja. Yang saya maksud dengan hal ini adalah ketika perempuan memiliki rumah, beban pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak jauh lebih besar jatuh kepada perempuan dibandingkan di negara lain. Karena itu, pantas saja perempuan tidak mau menikah.”

Gambar 2 dan cuplikan wawancara di atas menjelaskan ketidaksetaraan peran rumah tangga yang menyebabkan keengganan untuk menikah.

Menurut pria dalam video tersebut, persepsi bahwa tugas rumah tangga adalah tanggung jawab utama wanita dan bahwa pekerjaan di luar rumah adalah tanggung jawab utama pria dapat menciptakan tekanan tambahan bagi mereka yang ingin menjalani pernikahan.

Sekitar setengah (53,3%) dari populasi perempuan usia kerja di Jepang mempunyai pekerjaan, dan perempuan mewakili 44,4% angkatan kerja di Jepang (Chara Scroope, 2021)[7]. Walaupun hampir setengah populasi perempuan di Jepang mempunyai pekerjaan, perempuan masih menjadi penanggung jawab sebagian besar pekerjaan rumah tangga [10]. Peran laki-laki dalam pekerjaan rumah tangga kelihatannya masih belum cukup untuk meringankan beban rumah tangga yang dipertanggungjawabkan kepada perempuan. Karena kurangnya partisipasi laki-laki dalam pekerjaan rumah tangga, bahkan sampai ada istilah “*Furariimen*” bagi laki-laki yang sengaja tidak pulang ke rumah untuk menghindari pekerjaan rumah tangga [9].

Berikut adalah bagan pembagian pekerjaan rumah tangga antara laki-laki dan perempuan:



Gambar 3. Pembagian Pekerjaan Rumah Tangga Laki-Laki (Sumber: フリエ住まい総研, 2023)

Gambar 3 [4] menyatakan bahwa 71,1% pria membuang sampah, 50,4% mencuci piring, 46,5% membersihkan rumah dan lain-lain.



Gambar 4: Pembagian Pekerjaan Rumah Tangga Perempuan (Sumber: フリエ住まい総研, 2023)

Gambar 4 menunjukkan pembagian pekerjaan rumah tangga antara pria dan wanita di Jepang, di mana terlihat bahwa perempuan memikul beban yang jauh lebih besar dalam tugas rumah tangga dibandingkan laki-laki. Data ini memperlihatkan bahwa 89,3% wanita memasak, 84,2% mencuci baju, 80,7% membersihkan rumah, 78,0% mencuci piring, dan 77,4% belanja kebutuhan sehari-hari, serta tugas lainnya. Sementara itu, 73,8% pria mengaku sangat (40,2%) atau agak (33,6%) senang dengan pembagian kerja ini. Namun, hanya 46% wanita yang merasakan hal yang sama, sedangkan 33,9% perempuan mengatakan bahwa mereka agak (23,5%) atau sangat (10,4%) tidak senang dengan banyaknya pekerjaan rumah yang mereka pikul (フリエ住まい総研, 2023) [4].

Data 3 (Keengganan menikah karena keterbatasan waktu pribadi)

Data 3, pada 14 Mei 2020.



Gambar 5. Enggan Menikah karena Keterbatasan Waktu Pribadi.

A: 「結婚にこう、結婚しているとその結婚相手に縛られるので、あまり自分の自由な時間を過ごすなあとと思うし、家にいる時も一人の時間というのがあまりなくなってしまうので。孤独になりたい時とか外に行かなくちゃいけなくなります。」

Kekkon ni kō, kekkon shite iruto sono kekkon aite ni shibara rerunode, amari jibun no jiyūna jikan o sugosu naā to omou shi, ie ni iru toki mo hitori no jikan to iu no ga amari nakunatte shimaunode. Kodoku ni naritai toki toka soto ni ikanakucha ikenaku narimasu.

Terjemahan:

‘Ketika Anda menikah, Anda terikat dengan orang yang Anda nikahi, sehingga Anda tidak punya banyak waktu luang, dan bahkan ketika Anda di rumah, Anda tidak punya banyak waktu untuk diri sendiri. Saat ingin sendiri, harus pergi keluar.’

Gambar 5 dan cuplikan wawancara di atas menjelaskan keterbatasan waktu pribadi yang menjadi salah satu alasan keengganan untuk menikah di Jepang. Di tengah tuntutan hidup modern yang serba cepat, banyak individu, khususnya di perkotaan, merasakan tekanan dalam menyeimbangkan kehidupan pribadi dengan komitmen pernikahan. Kehidupan lajang menawarkan kebebasan yang lebih besar untuk mengatur waktu sesuai keinginan, tanpa harus terbebani dengan tanggung jawab tambahan yang hadir dalam pernikahan.

Seperti yang dikatakan pria dalam cuplikan tersebut, sebagian orang di Jepang cenderung memprioritaskan kebebasan pribadi dan waktu luangnya dibandingkan komitmen dan tanggung jawab yang timbul dalam pernikahan. Hal ini selaras dengan hasil survei pada tahun 2022, di mana 41% pria lajang di Jepang memilih untuk tidak menikah dengan alasan ingin menikmati hidup yang bebas dari kewajiban rumah tangga dan keluarga [2], [13], [3].

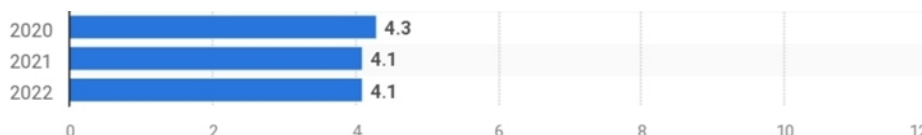


Gambar 6. Kanae Ito, 25 Wanita lajang, bersiap untuk sesi foto di Tokyo (Sumber: The New York Times, 2019)

Kehidupan lajang di Jepang sudah semakin normal. Dapat dilihat melalui banyaknya bisnis yang ditargetkan kepada masyarakat lajang. Misalnya, Karaoke Kan, salah satu gerai terbesar di Jepang, telah memiliki banyak gerai di Tokyo yang dirancang hanya untuk satu orang [1]. Gerai karaoke Koshidaka menemukan bahwa sekitar 30% pelanggannya di lokasi

pusat bernyanyi solo [1]. Adapun restoran yang dirancang untuk pengunjung lajang, kompleks apartemen yang menargetkan perempuan yang ingin membeli atau menyewa rumah sendiri, perusahaan tur wisata untuk wanita lajang [1], dan studio foto yang menawarkan sesi di mana wanita dapat mengenakan gaun pengantin dan berpose untuk potret pengantin lajang [20]. Fenomena ini menjadi bukti jelas perubahan preferensi gaya hidup masyarakat di Jepang.

Walaupun Pemerintahan Jepang sudah berupaya untuk menaikkan jumlah penduduk dengan memberikan berbagai kebijakan dari subsidi dana [16], [14], sampai mendanai agen perijodohan [12] seperti yang penulis sebutkan secara singkat pada data 1, upaya tersebut masih belum cukup untuk menaikkan angka pernikahan. Dapat dibuktikan melalui bagan berikut ini [11].



Gambar 7. Jumlah Pernikahan yang Terdaftar per 1.000 Penduduk di Jepang Dari Tahun 2020 hingga 2022 (Sumber: Statista)

4. Simpulan dan Saran

Meskipun pemerintah Jepang telah mengimplementasikan kebijakan untuk mendukung pernikahan dan keluarga, subsidi dan dukungan dana belum sepenuhnya mampu mengatasi kekhawatiran finansial yang memengaruhi keputusan untuk menikah.

Selain persoalan ekonomi, peran gender juga mempengaruhi keputusan seseorang untuk menikah, terlebihnya bagi kaum wanita. Persepsi tradisional tentang tugas rumah tangga dan pekerjaan di luar rumah yang masih membebani perempuan secara signifikan dapat menjadi hambatan bagi perempuan yang menginginkan keseimbangan dalam kehidupan pernikahan. Aspek keterbatasan waktu pribadi juga menjadi pertimbangan untuk menikah, di mana kebebasan dan ruang pribadi dianggap berharga, terutama dengan adanya tren kehidupan lajang yang semakin diterima dalam masyarakat Jepang. Fokus pada aktivitas individual, seperti gerai karaoke dan restoran yang mengakomodasi pelanggan tunggal, mencerminkan perubahan preferensi gaya hidup masyarakat Jepang.

Untuk menaikkan angka pernikahan, faktor-faktor seperti ketidakstabilan keuangan, ketidaksetaraan gender, dan perubahan preferensi gaya hidup tampaknya masih menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk memotivasi lebih banyak orang untuk menikah.

Daftar Pustaka

- [1] Adriana, "Going solo: The Japanese preference for living alone | Rethink Tokyo – Real Estate Information for Buyers and Investors," Rethink Tokyo – Real Estate Information for Buyers and Investors, Mar. 26, 2019. <https://www.google.com/url?q=https://www.rethinktokyo.com/Hitorigurashi-living-alone-japan&usq=AOvVaw0ax8TUG6unVjAOKqg1IAAr&hl=en-US>
- [2] Anonymous, "1 in 4 singles in 30s not willing to marry: Japan gov't survey," Kyodo News+. <https://english.kyodonews.net/news/2022/06/071c165ec1a5-1-in-4-singles-in-30s-not-willing-to-marry-japan-govt-survey.html#:~:text=One%20in%20four%20singles%20in>
- [3] Anonymous, "Japan: reasons not to marry among men 2022," Statista. <https://www.statista.com/statistics/1320679/japan-most-common-reasons-not-getting-married-men/#:~:text=Around%2041%20percent%20of%20single>
- [4] Anonymous, "パートナーの家事に対する満足度は男女で明確な差が？家族で取り組む「自宅の家事」について調査レポート," FLIE magazine, May 24, 2023. <https://flie.jp/magazine/features/research/vol-20/>
- [5] "Biaya Hidup di Jepang | Japan Care Worker Guide," May 25, 2022. <https://japanwcg.com/id/10506/>
- [6] C. Ghaznavi et al., "Salaries, degrees, and babies: Trends in fertility by income and education among Japanese men and women born 1943–1975—Analysis of national surveys," PLoS ONE, vol. 17, no. 4, p. e0266835, Apr. 2022, doi: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266835>.

- [7] C. Scroope, "Japanese Culture – Family," Cultural Atlas, 2021. <https://culturalatlas.sbs.com.au/japanese-culture/japanese-culture-family>
- [8] Eldwita Nofrelia and Shobichatul Aminah, "Isu Kesenjangan Gender Pasca Abenomics: Perkembangan Jumlah Pekerja Perempuan Jepang 2013-2020," *Jurnal Hawa Studi Pengaruh Utama Gender dan Anak*, vol. 4, no. 2, pp. 127–127, Dec. 2022, doi: <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v4i2.4724>
- [9] J. Allen, "'Furariimen': The Japanese Men Who Avoid Returning from Work," *Unseen Japan*, Feb. 06, 2019. <https://unseen-japan.com/furariimen-japanese-men-not-returning-home/>
- [10] J. Allen, "Survey: Japanese Women (Still) Do All the Housework," *Unseen Japan*, May 30, 2023. <https://unseen-japan.com/japanese-women-housework-survey/>
- [11] "Japan: marriage rate 1960-2022," Statista. <https://www.statista.com/statistics/1249856/japan-marriage-rate/#:~:text=In%202022%2C%20Japan%20registered%204.1>
- [12] "Japan's government will play romantic matchmaker in a bid to shore up the birth rate. Experts say it will fail.," *CBS News*, Feb. 16, 2023. Available: <https://www.cbsnews.com/news/japan-birth-rate-population-decline-government-matchmaking-marriage-children/>
- [13] J. McCurry, "Record number of young people in Japan rejecting marriage, survey shows," *the Guardian*, Sep. 14, 2022. <https://www.theguardian.com/world/2022/sep/14/record-number-of-young-people-in-japan-rejecting-marriage-survey-shows>
- [14] Lily, "Thinking of Starting a Family in Japan? These Are the Government Benefits You Need to Know About!," *tsunagujapan*, Jun. 18, 2020. <https://www.tsunagujapan.com/japan-marriage-parenting-welfare/>
- [15] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- [16] L. Nonomiya, M. Katanuma, and Y. Takeo, "Japan, in need of more babies, is helping pay for costly IVF," *The Japan Times*, Apr. 01, 2022. <https://www.japantimes.co.jp/news/2022/04/01/national/japan-ivf-support/>
- [17] M. Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- [18] Murakami, S. Japan PM Kishida: it's "now or never" to stop shrinking population. *Reuters*, Jan. 23, 2023. [https://www.reuters.com/world/asia-pacific/japan-pm-kishida-its-now-or-never-stop-shrinking-population-2023-01-23/#:~:text=Jan%2023%20\(Reuters\)%20%2D%20Japanese,for%20the%20world's%20oldest%20society.](https://www.reuters.com/world/asia-pacific/japan-pm-kishida-its-now-or-never-stop-shrinking-population-2023-01-23/#:~:text=Jan%2023%20(Reuters)%20%2D%20Japanese,for%20the%20world's%20oldest%20society.)
- [19] M. P. Wibawa and R. Arfianty, "Pengaruh Demografi dan Kebijakan Pemerintah Jepang Terhadap Depopulasi Negara Jepang Selama 2 Dekade Terakhir," *JURNAL TRANSBORDERS*, vol. 7, no. 2, Jun. 2024.
- [20] M. Rich, "Craving Freedom, Japan's Women Opt Out of Marriage," *The New York Times*, Aug. 03, 2019. Available: <https://www.nytimes.com/2019/08/03/world/asia/japan-single-women-marriage.html>
- [21] R. Oizumi, H. Inaba, T. Takada, Y. Enatsu, and K. Kinjo, "Sensitivity analysis on the declining population in Japan: Effects of prefecture-specific fertility and interregional migration," *PLOS ONE*, vol. 17, no. 9, p. e0273817, Sep. 2022, doi: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273817>
- [22] S. Iijima and K. Yokoyama, "Socioeconomic Factors and Policies regarding Declining Birth Rates in Japan," *Nihon Eiseigaku Zasshi. Japanese Journal of Hygiene*, vol. 73, no. 3, pp. 305–312, 2018, doi: <https://doi.org/10.1265/jjh.73.305>.
- [23] Sudaryanto, *Metode Dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*, Yogyakarta: Sanata Dharma, 2015.
- [24] T. Inoue, S. Koike, M. Yamauchi, and Y. Ishikawa, "Exploring the impact of depopulation on a country's population geography: Lessons learned from Japan," *Population, Space and Place*, Dec. 2021, doi: <https://doi.org/10.1002/psp.2543>.